



---

## **Gereja dan Mandat Sosial Politik**

**Septian Tri Cahyono**

[Gatul.iting.01012018@gmail.com](mailto:Gatul.iting.01012018@gmail.com)

---

### **Sejarah Artikel**

Dikirim: 17 Maret 2023

Direvisi: 10 April 2023

Terbit: 1 Juni 2023

---

### **Abstrak:**

Gereja yang adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dihadirkan dan berada di tengah-tengah lingkungan komunitas masyarakat secara luas. Dalam kehidupan bermasyarakat, gereja berinteraksi dan juga berada dalam suatu sistem kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat mandat sosial politik sebagai panggilan gereja. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana dan seperti apa seharusnya gereja terlibat dan andil bagian dalam pelaksanaan mandat sosial politik? Sehingga kehadiran dan keberadaan gereja dapat memberikan suatu peran dalam mewujudkan tri tugas gereja ditengah tengah kehidupan sosial politik. Dalam menjawab panggilan ini, salah satu peran yang dapat diberikan oleh gereja adalah dengan ikut terlibat dalam bidang pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan dimana gereja berada. Baik dari tingkat dasar maupun sampai tingkat yang lebih tinggi. Terutama dalam membangun ataupun meningkatkan pendidikan warga gereja. Dengan memberdayakan warganya sehingga dapat turut ambil bagian dalam kehidupan sosial politik, membangun bangsa dimana gereja telah Tuhan menempatkan. Mengembangkan dan memaksimalkan pendidikan untuk membentuk karakter yang benar dan berjiwa “pembangun” untuk membangun bangsa, membangun negara, serta menyejahterakan kehidupan sosial politik ditengah-tengah masyarakat.

**Kata Kunci: Gereja, Sosial, Politik, Pendidikan**

### **Abstract:**

*The Church which is a fellowship of believers in Jesus Christ is presented and is in the midst of a wider community environment. In social life, the church interacts and is also in a social system in which there is a socio-political mandate as the church's vocation. The question is how and in what way should the church be involved and take part in the implementation of the socio-political mandate? So that the presence and existence of the church can provide a role in realizing the three tasks of the church in the midst of social and political life. In answering this call, one of the roles that can be given by the church is to be involved in the field of education and improving the quality of human resources in the environment where the church is located. Both from the basic level and up to a higher level. Especially in building or improving the education of church members. By empowering its citizens so they can take part in social and political life, building a nation where the church has been placed by God. Develop and maximize education to form the right character and have a "builder" spirit to build the nation, build the country, and prosper social and political life in the midst of society.*

**Keywords: Church, Social, Politics, Education**

---

## **PENDAHULUAN**

Gereja adalah lembaga persekutuan orang percaya yang dibentuk oleh Allah berdasarkan kasih Kristus. Di dalam persekutuan tersebut hidup anggota-anggota tubuh Kristus yang bergerak bersama dengan sebuah komitmen untuk hidup dalam kebenaran firman Allah. Tujuan kehidupan yang dibangun didalam persekutuan tersebut adalah memuliakan Nama Tuhan Yesus sebagai ungkapan syukur atas anugerah kehidupan dan keselamatan.

Gereja yang merupakan kumpulan orang-orang percaya dalam Kristus memiliki tugas untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Berkenaan dengan tugas gereja yang merupakan orang-orang yang telah menerima kasih dari Allah, kasih Kristus yang telah memberikan keselamatan, maka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara luas, gereja dipandang perlu untuk memberikan peran dan ikut ambil bagian dalam upaya mensejahterakan lingkungan dan masyarakat dimana gereja berada dan diutus (Band. Yeremia 29:7).

Di Indonesia sendiri, ada banyak hal mengenai isu-isu sosial politik dimana gereja ada di tengah-tengah kondisi sosial politik ini. Pertanyaannya adalah bagaimana gereja memberikan peran dan turut ambil bagian dalam kehidupan sosial politik di Indonesia yang berkembang saat ini. Bagaimana seharusnya umat Tuhan yang telah terpanggil sebagai gereja atau tubuh Kristus menyikapi isu-isu sosial politik yang tengah terjadi dewasa ini.

## **METODE**

Dalam melakukan penulisan, penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menekankan pada studi pustaka untuk mendeskripsikan Gereja dan mandat sosial yang didalamnya gereja turut ambil bagian sebagai bentuk pelaksanaan tri tugas gereja. Sugiyono menyatakan bahwa “bila masalah penelitian evaluasi belum jelas, masih remang, atau masih gelap. Kondisi seperti ini cocok diteliti dengan metode kualitatif, karena ... akan langsung ke objek ... sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas”<sup>1</sup>

Tinjauan dan studi pustaka digunakan sebagai metodologi untuk melakukan penelitian dan mendapatkan gambaran umum tentang pokok masalah, serta beberapa pedoman untuk melakukan dan mengevaluasi masalah tersebut. Selain itu, data-data yang diperoleh dari berbagai literatur-literatur yang relevan seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah yang terkait dengan topik yang dipilih, digunakan untuk menambah referensi serta mendukung pendapat

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi)* (Bandung: Alfabeta, 2018), pp. 216–17.

terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sehingga melalui berbagai referensi yang ada, penulis mendapatkan suatu gambaran umum dan kemudian dirumuskan menjadi sebuah tesis atau gagasan guna memberikan sumbangsih pemikiran terkait pokok permasalahan yang diuraikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gereja

Dalam perjanjian Lama, Alkitab memakai dua istilah untuk menunjuk gereja, yakni *qahal* (dari kata *kal*) yang berarti “memanggil”, dan *edhah* (dari kata *ya’adh*) yang artinya “memilih, menunjuk, atau bertemu bersama-sama di suatu tempat yang telah ditunjuk”.<sup>2</sup> Sedangkan pada masa perjanjian baru, istilah gereja berasal dari dua kata, *Ek* dan *kaleo* yang artinya “memanggil keluar.” Dengan kata lain, gereja diartikan sebagai sekumpulan atau kelompok yang terpanggil oleh Allah sendiri. Hal ini lebih menunjuk kepada suatu perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus di dalam satu tempat.<sup>3</sup>

Melihat dari pengertian yang dimiliki oleh kata *ekklesia*, sangat jelas bisa diketahui bahwa kata *ekklesia* digunakan untuk menunjukkan suatu perkumpulan orang-orang percaya di tempat tertentu. Hal tersebut dapat diketahui dari penggunaan kata *ekklesia* yang banyak digunakan oleh Paulus dalam surat-surat yang ditulisnya. Maka dari itu tidaklah mengejutkan bahwa kata *ekklesia* lebih mengarah kepada pengertian bahwa kata ini diperuntukkan untuk jemaat-jemaat di tempat tertentu. Millard J. Erickson dalam bukunya “Teologi Kristen” mengatakan bahwa:

“Paulus menggunakan istilah *ekklesia* tersebut lebih banyak daripada penulis kitab lain dalam Perjanjian Baru. Karena surat-suratnya sebagian besar merupakan surat kepada jemaat lokal tertentu, tidaklah mengejutkan bahwa istilah ini pada umumnya merujuk kepada komunitas orang percaya yang berada di kota tertentu. Oleh karena itu bisa diketahui bahwa Paulus menulis surat yang ditujukan kepada jemaat Allah di Korintus (I Kor. 1:2; II Kor. 1), jemaat-jemaat di Galatia (Gal. 1:2), dan lain-lain.”<sup>4</sup>

Dapat disimpulkan bahwa gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya atau persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Gereja dalam pengertian *ekklesia* merupakan komunitas yang

---

<sup>2</sup> Louis Berkhof, *Teologi Sistematis 5: Doktrin Gereja* (Surabaya: Momentum, 2005), p. 5.

<sup>3</sup> Berkhof.

<sup>4</sup> Millard J. Erickson, *Teologi Kristen (Since 1983), Vol. 3 Dari Baker Book House Company* (Malang: Gandum Mas, 2014), p. 287.

terorganisir yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah penguasa tertinggi.<sup>5</sup> Dengan sederhana gereja itu sendiri mengarah kepada pribadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus.

### **Perkembangan Gereja**

Sepanjang sejarah perkembangan gereja sejak mula-mula hingga saat ini, setidaknya terdapat empat paradigma hubungan gereja dengan pemerintah atau negara. Secara ringkas, Borrong menyebutkan ada empat bagian paradigma, yakni bermusuhan, terpisah, mapan, dan semi terpisah.<sup>6</sup> Empat tahapan paradigma tersebut terjadi dengan rentang waktu yang berbeda dan dengan kondisi situasi politik yang berkembang pada saat itu. Baik situasi politik negara maupun dalam organisasi gereja.

Pandangan atau paradigma yang pertama, gereja yang “bermusuhan” dengan negara, terjadi pada masa awal, abad I hingga abad ke IV. Pada masa itu gereja belum merupakan suatu organisasi yang jelas yang juga menyebabkan hubungan antara gereja dan negara belum memiliki kejelasan secara organisasi. Beberapa hal yang mempengaruhi masa ini, yakni gereja tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan negara sehingga mengesampingkan isu-isu politik kenegaraan. Pandangan ini didukung oleh keadaan kekristenan pada masa itu merupakan suatu kelompok minoritas yang tidak memiliki wewenang dan kesempatan untuk memberikan pengaruh dalam politik. Selain itu, kekristenan mengharapkan bahwa sejarah akan segera berakhir seiring dengan kedatangan kerajaan Allah yang dijanjikan. Sehingga kekristenan (gereja) menganggap kurang penting untuk menanggapi isu-isu politik yang terjadi pada masa itu.<sup>7</sup> Paradigma ini diperkuat dengan anggapan bahwa kekuasaan ataupun isu-isu sosial politik dinilai akan berakhir seiring dengan berakhirnya atau kedatangan kerajaan Allah yang mengalahkan semua kekuasaan lainnya.

Pada perkembangan selanjutnya, pada abad ke V sampai abad ke XIV, gereja mulai memahami mengenai hubungan antara gereja dengan negara. Pada awal abad pertengahan ini, gereja mulai memiliki hubungan dengan negara berdasarkan dua cara pandang. Yakni pandangan “dua pedang” dan “hukum kodrati” yang masing-masing memberikan pengaruh cara pandang gereja dalam menjalin hubungan dengan negara<sup>8</sup>. Namun pada akhir dari abad pertengahan ini, gereja kembali memiliki perubahan paradigma atas hubungannya dari

---

<sup>5</sup> Davis Dictionary of the Bible, s.v. “*ekklesia*”

<sup>6</sup> Robert p. Borrong, *Etika Politik Kristen: Serba-Serbi Politik Praktis* (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi STT Jakarta, 2006), pp. 16–22.

<sup>7</sup> Clinton Gardner, *Biblical Faith and Social Ethics* (New York: Harper and Row Publisher, 1960), p. 312.

<sup>8</sup> Borrong.

Negara yang menempatkan negara berada di bawah kekuasaan gereja.

Pada abad XV hingga abad XVIII, gereja mengalami masa pencerahan dan reformasi oleh Marthin Luther dan juga John Calvin. Gereja memulai menghilangkan kekuasaan gereja di dalam kekuasaan negara sekalipun masih mempertahankan hubungan asimilasi dengan negara.<sup>9</sup> Hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pandangan gereja modern yang berada pada masa abad XIX sampai sekarang ini.

“Paham mengenai kehadiran gereja dalam dunia, termasuk di setiap negara memperlihatkan adanya dua pandangan utama, yaitu paradigma transformasi dan paradigma pemisahan ketat. Paradigma transformasi dianut baik golongan katolik, Lutheran, Calvinis, dan Metodis. Sedangkan paradigma pemisahan ketat dianut oleh berbagai gereja yang disebut “Gereja Damai” seperti menonite, Quaker, Baptis, dan Pentakosta.”<sup>10</sup>

Berbagai paradigma gereja akan hubungan dengan negara memberikan dampak dan juga pengaruh besar bagi kehidupan politik yang terjadi baik bagi negara, maupun bagi organisasi di dalam gereja sendiri.

## **Tugas Gereja**

Gereja memiliki tugas yang disebut dengan “Tri Tugas Gereja”, yaitu Bersaksi, Melayani, dan Bersekutu. Kata melayani diterjemahkan dari bahasa Yunani “*diakonos*” yang berarti petugas, pelayan (di meja dalam tugas kasar lainnya) - *an attendant, a waiter (at table in other menial duties)*.<sup>11</sup> Dengan demikian diakonia / melayani diartikan sebagai suatu aktivitas pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani. Berhubungan dengan hal ini, Abineno menjelaskan pengertian dalam diakonia dalam dunia Yunani seperti demikian:

“Kata Yunani “*Diakonia*” yang biasa dipakai untuk pelayanan meja makan, pelayanan pribadi kepada orang lain, pelayanan ini terutama dilakukan oleh hamba-hamba atau wanita-wanita dan itu dianggap sebagai suatu pekerjaan yang hina. Orang-orang merdeka dan orang-orang terpelajar tidak melayani di meja makan tetapi justru dilayani oleh pelayan-pelayan.”<sup>12</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa diakonia dalam pengertian Yunani menunjukkan pada suatu jabatan yang rendah. Yesus mengambil alih pengertian tersebut untuk menjelaskan status-Nya sebagai hamba yang melayani (Luk 22:27b). Yesus menyatakan hal

---

<sup>9</sup> Borrong.

<sup>10</sup> Borrong.

<sup>11</sup> James Strong, *Strong Exhaustive Concordance Greek Of New Testament* (Amerika: Mott Media, 1982), p. 22.

<sup>12</sup> J. L. Ch. Abineno, *Melayani Dan Beribadah Di Dalam Dunia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1974), p. 44.

tersebut dengan tujuan untuk membentuk pola hidup para murid sebagai pelayan, dengan suatu tujuan untuk melayani sesama seperti Tuhan.

Kata bersaksi (Yunani “*marturia*”) yang diterjemahkan sebagai “*a judicial witness*” atau seorang saksi yang berhubungan dengan perkara pengadilan. Hal ini dipakai dalam hubungannya dengan memberikan suatu kesaksian dalam suatu cara kerja yang resmi. Dalam bersaksi harus memberi suatu kesaksian sesuai dengan fakta atau kebenaran yang diketahui oleh seorang saksi. Kesaksian merupakan tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Dalam kesaksian tersebut dituntut: ketetapan hati (kesetiaan dan ketaatan), ketabahan (ketekunan dari seseorang yang memberikan kesaksiannya dan sedia menerima resiko bahkan setia sampai mati.<sup>13</sup> Menurut Frans Aliadi dalam bukunya *Dasar-dasar Pengembalaan*, Gereja memiliki panggilan yang jelas, yaitu sebagai agen kebenaran dan pembaharuan dunia.<sup>14</sup>

Tugas gereja yang ketiga adalah bersekutu (Yunani “*koinos*” yang berarti *common* - bersama).<sup>15</sup> Dalam konteks Yunani, sebenarnya kata *koinos* sendiri memiliki pengertian yang cukup luas dalam berbagai kegiatan yang mengekspresikan adanya persekutuan, misalnya: rekan kerja dalam bisnis, persahabatan dan ikatan perkawinan. Kata *koinonia* lebih menekankan kepada cara hidup dalam persekutuan orang percaya sebagai Tubuh Kristus yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan.<sup>16</sup>

## Sosial Politik

Secara etimologi, kata politik berasal dari kata Yunani *polis* (πόλις) yang artinya “kota” atau “suatu komunitas”.<sup>17</sup> Dari pengertian “polis” inilah terbentuk kata *politiea* (πολιτεία), yang diterjemahkan sebagai: “negara, warga negara, kesejahteraan atau cara hidup yang baik.”

System ataupun bentuk pelaksanaan politik, dalam perkembangannya selalu berubah-ubah dan senantiasa menyesuaikan dengan lembaga ataupun pelaku dimana politik itu dilaksanakan. Perkembangan ilmu politik akan terus berlanjut dan terus menyesuaikan

---

<sup>13</sup> Yakob Tomatala, *Penginjilan Masa Kini* (Malang: Gandum Mas, 1988), p. 25.

<sup>14</sup> Frans Aliadi, *Dasar-Dasar Pengembalaan: Pedoman Praktis Bagi Pelayanan Pengembalaan Masa Kini* (Palu: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022). P. 25.

<sup>15</sup> H. K. Moulton, *The Analytical Greek Lexicon* (Michigan: Zandervan Publishing House, 1978), p. 23.

<sup>16</sup> Harun Hadiwijono, *Iman Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), p. 17.

<sup>17</sup> Saut Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia-Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), p. 22.

dengan perkembangan lembaga dan organisasi.<sup>18</sup> Hal ini dikemukakan oleh Saut Sirait dalam kutipannya yang dikutip dari Goerge Sabine:

“Sepanjang sejarah pemikiran politik arti perkataan tersebut selalu berubah dan arti itu bergantung dari lembaga-lembaga dengan mana cita-cita itu harus diwujudkan dan tergantung dari masyarakat dimana badan-badan itu menjalankan fungsinya.”<sup>19</sup>

Kehidupan dan perkembangan politik akan sangat berkaitan erat dengan kehidupan sosial dimana kehidupan politik itu dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kehidupan politik terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sosial. Terjadinya perubahan sistem dan juga perilaku politik akan berbanding lurus dengan kondisi situasi sosial dalam masyarakat dan lingkungan dimana politik itu dilaksanakan. Bukan hanya kepada pelaku yang terlibat secara langsung dalam sistem politik tersebut, namun juga kepada orang-orang yang ada dalam lingkup politik tersebut.

### **Ruang Lingkup Sosial Politik**

Sosial politik berkembang dalam kehidupan kelompok, masyarakat dan sampai kepada kehidupan bernegara. Kehidupan social politik akan berkembang mulai dari sebuah lingkup kelompok kecil dan kemudian berkembang sampai kepada tingkatan lingkup yang lebih luas. Sampai kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesemuanya itu juga berkaitan dengan kebudayaan dan juga lingkungan dimana sistem politik itu dijalankan dalam lingkungan sosial yang ada.

Dalam negara Indonesia sendiri, kita dapat melihat kehidupan sosial yang merupakan warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Sikap kebersamaan dan kerukunan yang terus diupayakan dan dijaga yang juga merupakan sistem politik bangsa Indonesia. Suatu sikap kebersamaan yang disebut dengan gotong royong. Yakni, suatu sistem politik yang tercipta dan berkembang dalam sistem sosial kemasyarakatan dan dibangun atas dasar kekeluargaan yang menjadi budaya bagi bangsa Indonesia.

Dengan melihat hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari kehidupan sosial politik bukan saja terdapat pada sistem kenegaraan saja, namun juga berada di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Sehingga gereja yang juga merupakan bagian dari negara, artinya berada dalam sebuah negara yang memiliki sistem politik dalam sistem sosial, sudah selayaknya turut ambil bagian dalam menghidupi kehidupan sosial politik. Bukan hanya

---

<sup>18</sup> Sirait.

<sup>19</sup> Sirait.

berfokus dalam bidang atau aspek kerohanian semata, namun juga terlibat andil bagian dalam hal jasmani, kebutuhan akan *sandang, pangan dan papan*.

### **Gereja dan Mandat Sosial Politik**

Dalam kehidupan gereja di tengah masyarakat sosial, gereja juga tak dapat terlepas dari kehidupan politik. Hal ini menuntut pemahaman paradigma dan juga ketegasan gereja dalam melaksanakan atau pun mengenai keterlibatan gereja dalam politik di sebuah negara. Khususnya di Indonesia, dengan perkembangan dan isu yang terjadi dalam dunia sosial dan politik dimana gereja berada di dalamnya. Gereja di Indonesia dituntut untuk memiliki sikap dan tindakan untuk dapat turut ambil bagian dalam kehidupan politik dan sosial kemasyarakatan.

### **Keberadaan Gereja Dalam Pemerintahan di Indonesia**

Kehidupan gereja dan hubungannya dengan negara akan selalu bersentuhan dan berkaitan dengan apa yang disebut dengan tri tugas gereja. Bersaksi, melayani dan bersekutu. Masing-masing organisasi memiliki visi dan misi, baik gereja maupun negara. Hal ini menentukan bentuk kehadiran dalam kehidupan masyarakat secara sosial. Tak dapat dipungkiri pula bahwa warga gereja adalah bagian dari warga negara yang mau tidak mau juga akan terlibat dalam sistem kenegaraan yang di dalamnya juga terdapat politik yang menyangkut kehidupan sosial.

Sejarah munculnya Gereja di Indonesia dimulai dengan kedatangan para bangsawan dari Eropa yang mengajarkan dan membawa kekristenan (katolik) ke Indonesia. Sejak kolonial Hindia-Belanda menguasai Indonesia, mereka membawa dan menghadirkan “gereja” di Indonesia. Secara khusus di abad 16, ketika bangsa Portugis datang dengan semboyannya: *cuius regio, eius religios* (siapa punya negeri, dia punya agama).<sup>20</sup>

Dalam konteks hubungan gereja di Indonesia, sudah sangat jelas batasan hubungan antara gereja dengan negara. Posisi gereja di Indonesia bukan atau tidak berada pada *subordinasi* atau *underbow* dari Negara atau sebaliknya. Gereja dan pemerintahan (negara) berada pada posisi yang sejajar. Artinya gereja dan negara saling melengkapi, membantu, dan memberdayakan. Sehingga negara dan bangsa sudah selayaknya menjadi sasaran yang harus dipertimbangkan dan diberdayakan dengan dan melalui tri tugas gereja guna mewujudkan

---

<sup>20</sup> Muller Kruger, *Sejarah Gereja Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1966), p. 20.



kedamaian dan menyatakan kasih Allah.<sup>21</sup>

### **Tujuan Keterlibatan Gereja dalam Sosial Politik**

Gereja dalam melaksanakan tugasnya; bersaksi, melayani, dan bersekutu, memiliki tujuan dalam melaksanakan tugas gereja tersebut. Begitu juga keterlibatan gereja dalam kehidupan sosial politik, memiliki tujuan antara lain:<sup>22</sup>

- a. Tujuan pelayanan / pembebasan. Dalam konteks ini, gereja terpanggil untuk turut serta dalam memberikan pelayanan dan atau pembebasan bagi umat manusia seperti yang Allah lakukan. Gereja dipanggil untuk melayani dan memberikan pembebasan dalam mewujudkan keadilan dan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan termasuk aspek kehidupan beragama, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh adalah keterlibatan gereja dalam dunia pendidikan. Gereja hadir di bidang pendidikan untuk memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menikmati pendidikan sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 31.
- b. Tujuan Misioner. Berkaitan dengan tujuan ini, Allah dalam Kristus memberikan mandat bagi setiap orang percaya, bagi gereja dengan amanat agungNya. “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman (Mat. 28:19-20 TB).” Singkatnya, Allah mau agar setiap gereja memberitakan kabar baik kepada seluruh bangsa yang antara lain diwujudkan dalam kehidupan sosial politik. Gereja perlu memberitakan mengenai kerajaan Allah yang mengatasi pemerintahan manusia. Dalam catatan Alkitab, Nabi Yeremia memberikan pesan kepada bangsa Israel ketika berada dalam masa pembuangan di Babel agar turut serta dalam mengusahakan kesejahteraan kota dimana bangsa itu berada (Yer. 29:1-7 TB). Gereja dalam kehidupan bermasyarakat harus mampu menjadi pembawa dan turut mengusahakan kesejahteraan di lingkungan gereja berada. Melalui hal-hal kecil di masyarakat, bersama bergotong royong membangun lingkungan dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan bersama.
- c. Tujuan Korektif. Tujuan dari korektif yang dimaksudkan adalah untuk memberikan koreksi dan pengarahan agar sesuatu tetap berada pada jalur yang benar. Namun

---

<sup>21</sup> Darwin Lumbantobing, *Teologi Di Pasar Bebas* (Pematang Siantar: L-SAPA, 2008), pp. 267–68.

<sup>22</sup> Borrong.

tujuan ini akan dapat terlaksana apabila gereja juga mampu memperlihatkan kesaksian hidup yang baik dan benar. Sehingga kehadiran gereja dalam ranah sosial politik dapat memberikan garam dan membawa pengarahannya ataupun penggembalaan yang benar. Tujuan korektif ini juga dapat diartikan sebagai tujuan dari penggembalaan yang penekanannya untuk menumbuhkan kesadaran akan kasih Allah bagi mereka yang ingin berubah dan merasakan kasih Allah dalam hidupnya. Sehingga dalam kehidupan sosial dengan orang lain dapat memberikan dampak yang positif dan membawa damai bagi lingkungan sosial dan politik. Hal ini juga yang dilakukan Yesus semasa hidupnya ditengah-tengah bangsa Yahudi. Ia memberikan koreksi kepada pemimpin-pemimpin agama untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah.

- d. Tujuan Normatif. Dalam kaitannya dengan tujuan normatif, Iman kristen mengakui bahwa segala kuasa ada di tangan Kristus (Mat. 28:18 TB). Sehingga sudah seharusnya kuasa apapun yang ada dalam dunia ini, baik pemerintahan, politik, dan juga sosial mengacu kepada kuasa Kristus yang adalah wujud keadilan dan cinta kasih Allah bagi manusia. Tujuan normatif bertujuan untuk menegakkan kebenaran ditengah kehidupan politik dengan mewujudkan keadilan dan kasih ditengah kehidupan sosial politik. Singkatnya, tujuan gereja terlibat dalam politik adalah agar manusia lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia.
- e. Tujuan Edukatif. Tujuan edukatif lebih menekankan kepada pendidikan warga gereja untuk dapat memahami dan peduli mengenai tugas panggilannya di dunia. Gereja hadir untuk menggarami dan memberikan terang bagi seluruh umat manusia. Melalui kehidupan kesaksian gereja, kehidupan sosial politik diharapkan akan mengarah kepada kehidupan yang lebih baik. Sebab, warga gereja adalah warga kerajaan Allah yang ada dan hadir untuk dapat mewujudkan kasih Allah bagi sesama.

### **Isu Sosial Politik yang Berkembang**

Dalam kehidupan sosial-politik, banyak hal yang berkembang menjadi isu yang perlu untuk dikaji dan diperhatikan sebagai permasalahan yang harus ditindaklanjuti. Diantaranya adalah kehidupan masyarakat yang berada dalam kemiskinan, kesenjangan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat secara luas. Kesenjangan pendidikan, lapangan pekerjaan dan bahkan kesenjangan hak dalam beragama menjadi hal-hal yang layak mendapat perhatian khusus dalam kehidupan sosial-politik.

Indonesia sebagai negara yang berkembang, banyak diperhadapkan dengan masalah-

masalah yang berkenaan dengan kesejahteraan dan juga kesenjangan-kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal yang paling menonjol dalam permasalahan kehidupan sosial-politik di Indonesia adalah masalah pendidikan, kemiskinan dan solidaritas, krisis ekologi, pluralitas agama, dan keadilan kekuasaan.<sup>23</sup>

Hal ini tentu akan juga dialami oleh gereja yang adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan tujuan dan tugas gereja untuk menyaksikan kasih Allah, untuk mewujudkan pelayanan sebagai *diaken* yang melayani bukan saja dalam bidang kerohanian semata. Gereja juga menjadi bagian dalam isu-isu yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat sosial politik. Bagaimana gereja harus turut ambil bagian dalam memberdayakan warga gerejanya. Bagaimana gereja turut berusaha untuk mengatasi kemiskinan dan solidaritas, menumbuhkan kerukunan dalam pluralitas dan juga keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat secara luas berkaitan dengan kehidupan sosial politik yang terus berkembang.

### **Pandangan Gereja – Iman Kristen**

Masalah hubungan Gereja dan Negara dapat berjalan dengan baik apabila Gereja dapat menempatkan diri dalam kehidupan bernegara, juga negara dapat melihat bahwa Gereja merupakan suatu bagian sosial dalam bermasyarakat dan bernegara. Gereja dapat melihat keburukan dan kebaikan yang dilakukan negara dan Gereja tidak tertutup dengan permasalahan yang dialami negara. Yang terpenting adalah Gereja tetap dapat menjadi terang dan garam dunia sehingga visi pelayanan dapat dicapai dan misi Allah dapat diwujudkan.

Dengan demikian berarti bahwa iman kristen tidak menolak dan atau menentang adanya sistem politik dalam kehidupan bernegara. Bahkan Yesus sendiri juga ada dan turut dalam kehidupan politik. Akan tetapi Yesus tidak secara politik praktis. Yesus menunjukkan tujuan yang jelas dalam keterlibatannya di bidang politik, yakni untuk melakukan tujuan korektif kepada pihak yang ada dalam politik praktis.

Gereja sebagai bentuk nyata dari kehidupan kekristenan dengan tri tugas gereja sebagai pernyataan iman tidak dapat terlepas dari kehidupan secara praktis dalam masyarakat. Sirait mengatakan bahwa “hubungan iman dengan realitas menjadi sesuatu yang tidak dapat

---

<sup>23</sup> Zakaria J. Ngelow, ‘Mendung Di Timur’, in *Struggling in Hope*, ed. by Ferdinand Suleeman (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), p. 682 (pp. 671–82).

terpisahkan dari perspektif iman kristen.”<sup>24</sup> Dengan kata lain, iman yang tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata, sama halnya dengan menghilangkan atau tidak ada wujud nyata dari pelayanan, kesaksian dan bahkan iman itu sendiri.

### **Bagaimana Gereja Ambil bagian dalam Sosial Politik**

Kegiatan politik dalam pandangan kaum awam secara umum dikatakan hanya urusan dari orang-orang yang berkecimpung dalam urusan politik tersebut. Sosial politik adalah urusan para anggota dewan, para wakil rakyat dan orang-orang yang masuk dalam pemerintahan dan bukan urusan orang awam. Gereja sebagai sebuah organisasi dalam kehidupan masyarakat sebaiknya memahami kehidupan sosial politik dimana gereja itu berada. Artinya bahwa gereja harus memberikan pendidikan atau pemahaman kepada warganya untuk dapat memahami dan tanggap terhadap isu-isu sosial politik yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga setiap warga gereja (gereja) mampu menghadapi perubahan-perubahan dan tuntutan zaman yang semakin berkembang. Para pemimpin gereja pun juga semestinya tanggap dan dapat ambil bagian dalam kehidupan sosial politik. Namun tidak berarti harus terlibat secara langsung dalam politik praktis.

Menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana gereja dapat menempatkan dirinya dalam menyikapi isu-isu sosial politik keagamaan yang seringkali menjadi permasalahan yang sangat pelik di Indonesia. Seringkali pemimpin-pemimpin gereja memandang persoalan-persoalan semacam ini sebagai hal diluar tanggung jawab gereja. Persinggungan dengan agama, menjadi suatu hal yang “sensitif” dalam pengambilan keputusan dalam gereja.

Sebagai satu contoh isu sosial politik yang terjadi, adalah adanya ketimpangan ekonomi yang sering muncul di Indonesia. Pada dekade ini, Indonesia memiliki ekonomi yang berkembang pesat, namun masih dijumpai masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sekalipun dalam praktiknya, program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi telah diluncurkan, akan tetapi masih perlu peningkatan dalam implementasi dan hasil yang dicapai.

Berkenaan dengan isu sosial politik yang terjadi, Gereja dipanggil untuk dapat ikut ambil bagian dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia. Dengan memberdayakan jemaat dan juga sumber daya yang dimiliki. Tentu hal ini diperlukan adanya sinergisitas antara gereja dan juga pemerintah terkait. Sekalipun ruang lingkup gereja terbatas, namun dalam praktik pelayanan kepada masyarakat secara sosial, gereja bersama

---

<sup>24</sup> Sirait.

dengan pemerintah hendaknya bersinergi untuk memberikan pelayanan kemanusiaan dalam arti mengusahakan dan mewujudkan kasih Allah sebagai bentuk kesaksian gereja ditengah pluralisme.

Dari sekian banyak isu masalah sosial politik yang terjadi di Indonesia, menurut hemat penulis, isu yang menjadi akar dari permasalahan sosial lainnya adalah dalam hal pendidikan. Oleh sebab dengan adanya pendidikan, seseorang akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, akan mampu bersaing dengan kemajuan ilmu teknologi dan tuntutan perkembangan zaman. Dengan memiliki pendidikan, pola pikir dan karakter yang baik, seseorang akan dapat meminimalisir kesenjangan dari pluralitas budaya dan agama yang seringkali muncul.

Menjadi sangat penting bagi gereja untuk dapat berperan dan bertindak dalam bidang ini. Bagaimana gereja sebagai suatu organisasi dalam masyarakat harus turut ambil bagian dalam mencerdaskan warganya yang adalah warga negara Indonesia dimana gereja berada. Pasal 31 UUD 1945 dengan sangat jelas menyatakan bahwa negara menjamin atas hak warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan baik dalam hal iptek, maupun juga dalam keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan.

Pertanyaan mendasar bagi gereja adalah; apa dan bagaimana seharusnya gereja bertindak dan berperan dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia sebagai upaya untuk menyikapi isu-isu sosial politik yang berkembang di negara ini? Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa melalui pendidikan, setiap warga negara dididik menjadi warga negara yang bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah airnya.<sup>25</sup> Pendidikan juga merupakan sebuah upaya sadar untuk memperlengkapi, membimbing orang atau kelompok untuk keluar dari satu tahapan hidup ke tahapan hidup lainnya yang lebih baik.<sup>26</sup> Sehingga gereja sebagai lembaga yang berorientasi kepada pembinaan mental dan karakter dengan tujuan agar setiap warganya memiliki kehidupan yang sesuai dengan Firman Tuhan, harus turut mengambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Gereja sangat perlu memiliki peranan dalam pendidikan. Setidaknya pendidikan bagi warganya. Berkenaan dengan isu sosial politik yang berkembang, masalah-masalah pendidikan dan kemiskinan yang sangat erat kaitannya, sudah selayaknya gereja mengembangkan dan melaksanakan pelayanan pengembangan sumber daya manusia. Melalui

---

<sup>25</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), p. 19,33.

<sup>26</sup> Alfius Areng Mutak, 'Gereja Dan Pendidikan Kristen', *Jurnal Theologia Aletheia*, 7 nomor 12 (2005), 13.

pendidikan warga gereja yang kemudian dapat memberikan dampak yang positif bagi kalangan luas di masyarakat. Dengan demikian, dalam mewujudkan tri tugas gereja, hal yang dapat dilakukan oleh gereja antara lain adalah dengan memfasilitasi ataupun melaksanakan program pendidikan melalui sekolah-sekolah, baik formal maupun informal.

Sekolah- sekolah Kristen (lembaga pendidikan Kristen) adalah wahana yang paling strategis tidak saja dalam konteks pencerdasan kehidupan bangsa, tetapi juga dalam memperkenalkan membagikan serta mentransfer nilai-nilai kristiani kepada para peserta didik. Sekolah-sekolah merupakan ujung tombak tatkala gereja dan komunitas kristen berinteraksi dengan masyarakat luas<sup>27</sup>.

Dengan gereja menerapkan pendidikan bagi warga gerejanya, dan mengembangkan serta memberikan pelatihan untuk memaksimalkan para warga gerejanya, hal ini akan menjadi awal untuk dapat mengembangkan dan memaksimalkan potensi masyarakat untuk dapat menghadapi setiap isu-isu sosial politik yang berkembang saat ini. Khususnya dalam hal pendidikan yang seringkali menimbulkan permasalahan sosial lainnya. Dengan demikian, maka gereja akan dapat secara langsung berinteraksi dalam masyarakat untuk mewujudkan tri tugas pelayanan gereja.

Sebagai lembaga yang “semi terpisah” dengan negara, gereja harus mendukung dan turut mengembangkan sumber daya manusia di negara ini dengan turut ambil bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini gereja dapat terlibat meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan mutu guru. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas manusia, kualitas guru harus terus ditingkatkan mutunya. Sebab guru memberi andil dalam menentukan kualitas pendidikan. Menurut Simbolon, guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan nasional, sehingga guru haruslah seorang yang memiliki kualitas yang baik agar selalu siap melaksanakan proses pembelajaran di kelas.<sup>28</sup>

Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia (guru pendidik, guru agama kristen), gereja juga dapat memfasilitasi ataupun membuka sekolah-sekolah baik tingkat PAUD maupun Sekolah Dasar dan bahkan Perguruan Tinggi. Sehingga sumber daya manusia yang telah dipersiapkan dapat menerapkan kemampuannya dalam kehidupan masyarakat dan turut dalam mengembangkan serta mencerdaskan kehidupan bangsa secara luas dalam masyarakat.

---

<sup>27</sup> Weinata Sairin, ‘Memaknai Relasi Gereja Dengan Sekolah’, *Sabda.Org*, 2015.

<sup>28</sup> O. Simbolon, ‘Strategi Pengembangan Sekolah Kristen Pada Era Tenggul Landas’, in *Identitas Dan Ciri Khas Pendidikan Kristen Di Indonesia Antara Konseptual Dan Operasional*, ed. by Weinata Sairin (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), p. 54.

Mengapa pelayanan ini menjadi sangat penting bagi gereja? Badan Pusat Statistik tahun 2022 memberikan data bahwa tingkat atau jumlah penduduk usia sekolah dalam kota dan desa masih sangat tinggi untuk jumlah penduduk yang tidak bersekolah lagi. Semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Secara umum, sesuai dengan data yang diberikan oleh Badan Statistik Indonesia berkenaan dengan data putus sekolah, terdapat 1 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang SD/ sederajat. Persentase ini lebih kecil dibandingkan angka putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SMP/ sederajat, 10 di antaranya putus sekolah. Sedangkan, angka putus sekolah pada jenjang SM/ sederajat terdapat 13 dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SM/ sederajat putus sekolah.<sup>29</sup> Semakin naik kelompok usia, semakin naik juga angka tingkat pendidikan yang sudah tidak melanjutkan pendidikannya. Hal ini sudah barang tentu akan berdampak kepada kehidupan atau isu sosial lainnya seperti pengangguran, kemiskinan, kriminalitas dan lain sebagainya.

Melihat hal ini, gereja harus mampu memberikan pendidikan dan pembinaan yang tepat guna dan mampu membawa masyarakat, warga gereja untuk semakin berkembang. Yewangoe mengatakan “Di Indonesia, baik di kalangan gereja Katolik maupun Reformasi, upaya untuk menjadikan manusia Indonesia sebagai “Manusia Pembangun” adalah salah satu wujud pergumulan teologis gereja-gereja di Indonesia”<sup>30</sup> Dengan jiwa “Manusia Pembangun” dari hasil pendidikan yang tepat, maka isu social seperti kemiskinan, pengangguran dan bahkan kriminalitas akan dapat diminimalisir.

Dalam konteks Propinsi Kalimantan Barat, tingkat pendidikan dapat dikatakan masih minim. Kurang meratanya sistem pendidikan dan tenaga pengajar menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat pendidikan di daerah ini. Masih banyak daerah di Kalimantan Barat, khususnya daerah yang termasuk daerah 3T (Terpencil, terjauh, terluar), yang masih minim mendapatkan pendidikan. Tariyah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, seperti dikutip dari laman <https://www.sonora.id>, menyatakan bahwa "Prioritas kami ke depan di tahun 2023 adalah mencoba menjangkau wilayah - wilayah 3T terkait edukasi dan sosialisasi serta jemput bola dalam penanganan laporan masyarakat di daerah 3 T (Terpencil, Terjauh, dan Terluar)"<sup>31</sup>. Terlihat kesenjangan antara pendidikan di perkotaan dan perdesaan, dimana angka putus sekolah pada semua jenjang

---

<sup>29</sup> Rida Agustina and others, *Statistik Pendidikan 2022*, ed. by Raden Sinang and Ika Maylasari (Jakarta: BPS RI, 2022), p. 149.

<sup>30</sup> A.A. Yewangoe, *Iman, Agama, Dan Masyarakat Dalam Negara Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), p. 50.

<sup>31</sup> William, ‘Ombudsman Kalbar Targetkan Layanan Pelaporan Di Daerah 3T’, *Sonora.Id*, 2022.

pendidikan di perdesaan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pendidikan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena pendidikan di perkotaan lebih mudah diakses dibandingkan di perdesaan. Sehingga masih banyak anak usia sekolah di perdesaan yang harus pergi meninggalkan kampung halaman mereka untuk dapat mengenyam pendidikan. Dengan kondisi ini, sangat diperlukan peran gereja dalam masyarakat secara luas dalam turut serta membangun daerah melalui pengembangan sumber daya manusia.

Persoalan pendidikan merupakan persoalan yang harus diselesaikan di Indonesia. Penyelesaian tersebut tidak dapat begitu saja dibebankan hanya pada pemerintah semata. Secara konstitusional persoalan tersebut memang menjadi tanggungjawab pemerintah, akan tetapi secara moral hal tersebut adalah tanggungjawab semua warga Negara yang dalam hal ini Gereja dapat menjadikan hal ini sebagai bagian dari pelayanan gerejawi. Gereja secara moral memiliki tanggungjawab terhadap anak-anak yang putus sekolah yang jumlahnya masih sangat besar.

Kemudian tanggungjawab sekolah Kristen dalam melengkapi anak didiknya diungkapkan oleh Arthur F. Holmes sebagaimana dikutip oleh Alfius Areng Mutak sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dalam bentuk talenta, karunia dan profesi.
- b. Wawasan baru bagi peserta didik, berkaitan dengan kemampuannya untuk secara efektif memanfaatkan waktu senggangnya demi kemuliaan Kristus.
- c. Pemahaman akan panggilan hidup sebagai warga negara yang bertanggungjawab.
- d. Dorongan-dorongan guna memungkinkan anak didik menjadi warga negara yang tangguh, serta memiliki pengetahuan tentang identitas dan peranan gereja dalam dunia ini.
- e. Wawasan-wawasan baru yang akan membantu anak didik dalam menghadapi dinamika perubahan dan tantangan jaman, serta bersikap kritis terhadap trend yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
- f. Membimbing anak didik agar dapat memiliki pandangan hidup yang menyeluruh, menyatu, dan yang dapat diandalkan dalam memainkan peranannya bagi pembangunan dan pembaharuan (transformasi) masyarakat

---

<sup>32</sup> Mutak.



## **KESIMPULAN**

Gereja yang adalah wujudnyata dari keberadaan Allah di tengah dunia dan masyarakat sosial dengan keberagaman kehidupan serta kesenjangan yang ada disana-sini, sudah seharusnya Gereja dapat mewujudkan kasih Allah kepada dunia ditengah masyarakat sosial politik. Dengan cara memberdayakan warga jemaatnya untuk dapat turut serta ambil bagian dalam kehidupan sosial politik. Turut serta membangun negara dan bangsa dimana gereja (orang percaya) telah Tuhan tempatkan. Mengembangkan potensi dan memaksimalkan pendidikan sebagai langkah untuk membentuk karakter yang benar dan berjiwa “pembangun”, sehingga gereja – orang percaya akan mampu membangun bangsanya, membangun negaranya, serta dapat memberikan buah bagi kesejahteraan kehidupan sosial politik dimana Tuhan menempatkan gereja ditengah-tengah dunia ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abineno, J. L. Ch., *Melayani Dan Beribadah Di Dalam Dunia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1974)
- Agustina, Rida, Rini Sulistyowati, Mega Silviliyana, Rhiska Putrianti, and Ganish Anggraeni, *Statistik Pendidikan 2022*, ed. by Raden Sinang and Ika Maylasari (Jakarta: BPS RI, 2022)
- Aliadi, Frans, *Dasar-Dasar Penggembalaan: Pedoman Praktis Bagi Pelayanan Penggembalaan Masa Kini* (Palu: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022)
- Berkhof, Louis, *Teologi Sistemika 5: Doktrin Gereja* (Surabaya: Momentum, 2005)
- Borrong, Robert p., *Etika Politik Kristen: Serba-Serbi Politik Praktis* (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi STT Jakarta, 2006)
- Erickson, Millard J., *Teologi Kristen (Since 1983), Vol. 3 Dari Baker Book House Company* (Malang: Gandum Mas, 2014)
- Gardner, Clinton, *Biblical Faith and Social Ethics* (New York: Harper and Row Publisher, 1960)
- Hadiwijono, Harun, *Iman Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982)
- Kruger, Muller, *Sejarah Gereja Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1966)
- Lumbantobing, Darwin, *Teologi Di Pasar Bebas* (Pematang Siantar: L-SAPA, 2008)
- Moulton, H. K., *The Analytical Greek Lexicon* (Michigan: Zandervan Publishing House, 1978)
- Mutak, Alfius Areng, 'Gereja Dan Pendidikan Kristen', *Jurnal Theologia Aletheia*, 7 nomor 12 (2005), 13
- Ngelow, Zakaria J., 'Mendung Di Timur', in *Struggling in Hope*, ed. by Ferdinand Suleman (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), p. 682
- Purwanto, Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- Sairin, Weinata, 'Memaknai Relasi Gereja Dengan Sekolah', *Sabda.Org*, 2015
- Simbolon, O., 'Strategi Pengembangan Sekolah Kristen Pada Era Tinggal Landas', in *Identitas Dan Ciri Khas Pendidikan Kristen Di Indonesia Antara Konseptual Dan Operasional*, ed. by Weinata Sairin (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), p. 54
- Sirait, Saut, *Politik Kristen Di Indonesia-Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011)
- Strong, James, *Strong Exhaustive Concordance Greek Of New Testament* (Amerika: Mott Media, 1982)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi)* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Tomatala, Yakob, *Penginjilan Masa Kini* (Malang: Gandum Mas, 1988)
- William, 'Ombudsman Kalbar Targetkan Layanan Pelaporan Di Daerah 3T', *Sonora.Id*, 2022
- Yewangoe, A.A., *Iman, Agama, Dan Masyarakat Dalam Negara Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011)